

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aay Muh Furkon, dkk, 2012, *Penelitian Kebijakan Peningkatan Propempera Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: The Habibie Center.
- Djoko Prakorso, 1995, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Efrizal Yoyoh Rohaniah, 2017, *Sistem Politik Indonesia: Menjelajahi Teori dan Praktik*. Malang: Intrans Publishing.
- Eka Nam Sihombing, 2020, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press.
- Liberthin Palullungan, 2023, *Pembentukan Peraturan Daerah*, Makassar: Nas Media Pustaka.
- Muhammad Yusrizal A.S, & Mhd Ansor L, 2024, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Dinamika Peraturan Daerah*, Semarang: CV Eureka Media Aksara.
- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Sadu Wasistiono dan Yonata Wiyoso, 2010, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung: Fokusmedia.
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Propempera*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sarundajang, 2002, *Pemerintah Daerah Diberbagai Negara: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Syamsuddin Haris, 2007, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press, hlm. 88.

Tjandra, W. Riawan, dkk, 2009, *Legislatif Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Widarta, 2001, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diubah menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004, dan diubah kembali yang berlaku sampai saat ini yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

C. Jurnal

Asapa, dkk, 2023, "*Pelaksanaan Propemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.*" *Journal of Lex*

Philosophy (JLP) 4, No. 2.

Bandiyah dkk, 2014, "*Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah)*" Jurnal FISIP Universitas Udayana

Bari, dkk, 2024, "*Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.*" *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, No 2.

Barlian, Aristo Evandy A, 2016, "*Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum.*" *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 4.

Isroji, dkk, 2024, "*Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia.*" *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, No 1.

Margaretha, Adam Idris, and Achmad Djumlani, 2014, "*Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Legislasi di Kabupaten Kutai Barat.*" *Jurnal Administrative Reform* 2, No. 2.

Michael A. Pangemanan, 2016, "*Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah.*" *Lex Privatum*. Vol. 4, No. 8.

Mokoagow, Moh Syahrudin, 2018, "*Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (Dprd) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016.*" *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)* 1, No. 01.

Nadir, Sakinah, 2013, "*Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa.*" *Jurnal Politik Profetik* 1, No. 1.

Pahlevi, dkk, 2021, "*Peran Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Kediri (Studi Di Kantor Sekretariat DPRD Kota Kediri).*" PhD diss., Universitas Brawijaya.

Pratama, Adrian, 2021, "*Kedudukan Peraturan Tata Tertib Dprd Dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan Di Indonesia.*" Phd Diss.,

Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

- Pratama, Tiara Rezki, 2016, *"Pelaksanaan Propemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."* JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) 14, No. 2.
- Radjab, Dasril, 2018, *"Pergeseran Propemperda DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Memperkuat Kedudukan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah."* Wajah Hukum 2, No. 1.
- Rahyunir Rauf, 2016, *"Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah"*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru Riau.
- Rustandi, Roni, 2017, *"Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015."* Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 4, No. 1.
- Bandiyang, Ryonosaleh, 2023, *"Hubungan Kepala Daerah Dengan Dprd Kabupaten Samosir Dalam Pembentukan Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Izin Usaha Perdagangan, Gudang Dan Tanda Daftar Perusahaan, Dihubungkan Dengan Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."* Phd Diss., Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Thomy Loda, 2019, *"Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Propemperda di Kabupaten Halahera Barat."* Jurnal Eksekutif. Vol 3, No.3.
- Wijayanti, Septi Nur, 2016, *"Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014."* Jurnal Media Hukum Vol 23, No. 2.
- Yanuaris Halawa, dkk, 2022, *"Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah."* Nommense Journal of Constitutional and Administrative Law. Vol 1, No. 1.